

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anonim. (7 Desember 2019). Kota Cirebon Memiliki Keunggulan Teknologi informasi dan Kreatifitas. Dipetik 16 September 2020. Dari Jabar online: <https://jabaronline.com/ragam/kota-cirebon-miliki-keunggulan-teknologi-informasi-dan-kreatifitas-sdm>
- Aulia, G., & Kurniawan, T. (2019). *The Implementation of Open Data Program in the Special Capital Region (DKI) of Jakarta Province*. In *3rd International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology, SIET 2018 - Proceedings* (pp. 96- 100). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Ayre, Lori Bowen, Jim Craner. (2017). *Open Data: What It Is and Why You Should Care*, Public Library Quarterly. 173-184.
- Carpenter, W. S. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. By Harold D. Lasswell. (New York: Whittlesey House. 1936. Pp. ix,
- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. California : Sage Publication
- Damanik, Caroline. (17 Januari 2017). *Dua Tahun Tanpa Pendamping, Wali Kota Cirebon Kewalahan*. Dipetik 25 Agustus 2020, dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2017/01/19/15010031/dua.tahun.tanpa.pendamping.wali.kota.cirebon.kewalahan>.
- DKIS. (2018, Maret 22). *Satu Data, DKIS Kota Cirebon Buatkan Cirebon Bulan Ini*. Dipetik Desember 18, 2018, dari Cirebon Kota: <http://www.cirebonkota.go.id/?p=15815>
- DKIS. (2018). Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Kota Cirebon.
- Dunn, William N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Fajlin, Eka Yulianti. (1 Juli 2020). *Diskominfo Rancang Kota Semarang Satu Data Melalui Model CCTV Analytics*. Dipetik 10 September 2020, dari Jateng Tribunnews: <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/01/diskominfo-rancang-kota-semarang-satu-data-melalui-model-cctv-analytics>.
- Gunawan, Dani & Amalia. (2018). *The Implementation of Open Data In Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Haboddin, Mohtar. (2019). *Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal*. JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol 1, No 1 (2019), 21-28 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Brawijaya, Malang – Indonesia.
- Hariani, Nurul J. (2017). *Evaluasi Kinerja Kebijakan Kesehatan Ibu Dan Anak (Studi Evaluasi Policy Output dan Policy Outcome Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Kabupaten Sidoarjo)*. Kebijakan dan Manajemen Publik, 5 (3). pp. 1-13. ISSN 2303 - 3411
- Howlett, Michael & M. Ramesh. (1998). Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Postpositivist Analysis of the Politics of the Policy process. *Policy Studies Journal*, Vol. 26, No. 3, 1998 (466-481).
- Hogwood dan Gunn. 1984. *Policy anaysys for the real wordl*. Oxford: oxford : University press
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Public Disobedience : Telaah Penolaka Publik terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumanegara, Solahudin. (2010). *Model dan Aktor dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lester, James P. and Joseph Stewart. (2000). *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth, Second Edition
- Maizunati, Nur Afiah. (2018). *Implementasi Data Sektoral Terbuka Dalam Mendukung Smart Governane di Kota Magelang*. Magelang: Jurnal Universitas Tidar.
- Monino, Jean-Louis dan Soraya Sedkaoui. (2016). *Big Data, Open Data and Data Development*. United States: Wiley-ISTE.
- Nadir, Sakinah. (2018). *Rejim Kebijakan Dalam Dinamika Kebijakan Pembangunan Kota*. Jurnal Politik Profetik. Volume 6, No. 2.

- Nugroho, Riant. (2016). *Public Policy edisi 6*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2003). *Formulasi, Implementasi, & Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Oetojo, A. (2002). *Arah Kebijakan Sistem Informasi dan Telematika*. Makalah Rapat Koordinasi Teknis.
- Peterson, Steven, A. (2003). Public Policy dalam Jack Rabin, *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. New York & Basel: Marcell Dekker.
- Purwanto, Erwan A & Dyah Ratih S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Rofahan, Ahmad. (16 September 2015). Tujuh Bulan Cirebon Tanpa Waki Walikota. Dipetik 16 September 2020, dari Medcom.id:
<https://nusantara.medcom.id/jawabarat/peristiwa/8ko2mYYb-tujuh-bulan-cirebon-tanpa-wakil-wali-kota>
- Safaria, Anne Friday, Dkk. (2019). *Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Progm Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi publik*. Bandung : Jurnal Administrasi Publik.
- Santoso, Purwo. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Resesearch Center fot Politics and Government.
- Sasmito leolantif (2015) Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta (*Studi Kasus Integrasi Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DKI Jakarta*). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ramadani, Indrianto Roberto, (2017). *Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Oleh PT Swakarsa Sinar Sentosa di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*. *eJournal Pemerintahan Integratif*.
- Ruijter, E., et al., (2017). *Open data for democracy: Developing a theoretical framework for open data use*. *Government Information Quarterly*:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2017.01.001>

Salam, Nuku Nugraha. (2012). *Pemblokiran Konten Pornografi di Internet: Peranan Pembelajaran dalam implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Universita Gadjah Mada.

Sitokdana, M. (2015). *“Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura”*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Soewarno Handyaningrat. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung

Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suhendar, D. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA) Vol. II Universitas Kuningan*, 21-41.

Sunarsih. (2018). *Evaluasi Program Pilot Project Desa Melek Politik KPU Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Syamsuadi, A. (2017). *Pelayanan Publik dan Birokrasi Pemerintahan*. Pekanbaru: Universitas Abdurrah.

Trimarlinawati, Erischa Juliana. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Kampung Tematik Di Kota Semarang Studi Kasus Kampung Tematik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial. (2014). *Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Usman, Husaini. (2013). *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.

Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di

Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105.

Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia: Malang.

Wulansari, Eneng Dewi. (2019). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung*. Skripsi(S1) Thesis, Fisip Unpas.

Perundang-undangan

- Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- Peraturan Presiden No.39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- Rancangan Peraturan Walikota Cirebon tentang Cirebon Satu Data.

Keputusan Walikota Cirebon No: 134.05/p.498-DKIS/2017 tentang Forum Satu Data dan Kesekretariatan Satu Data Kota Cirebon.